

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Asa Briggs, *The Welfare State in Historical Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1961).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2006).
- Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959).
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009).
- Nur Masripatin, dkk., *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Seerden, dkk., *Public Environmental Law in the European Union and the United States: A Comparative Analysis*, (Netherlands: Kluwer Law International, 2002).
- Siti Resmi, *Perpajakan, Teori, dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

Waluyo, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).  
Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

### **Jurnal**

- Ade Bebi Irama, “Potensi Penerimaan Negara dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Info Artha* Vol. 3 No. 2 (2019): 134. DOI: <https://doi.org/10.31092/jia.v3i2.585>
- Amalia Yuliasih. “Dampak Politik dan Ekonomi Penghapusan Pajak Karbon Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 6 No. 1 (2018): 182-183.
- C. Ordonez dan P.N Duinker, “Interpreting Sustainability for Urban Forests”, *Jurnal Canada* Vol. 2 (2010): 124-127. DOI: <https://doi.org/10.3390/su2061510>
- Dian Ratnawati, “Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia”, *Indonesian Treasury Review* Vol. 1 No. 2 (2016): 54. DOI: <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.51>
- Dina Labiba dan Wisnu Pradoto, “Sebaran Emisi CO<sub>2</sub> dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Area Industri di Kendal”, *Jurnal Pengembangan Kota* Vol. 6 No. 2 (2018): 164. DOI: 10.14710/jpk.6.2.164-173
- Dwi Resti dan Hikmatul Fikri, “Menimbang Rencana Pemungutan Pajak Karbon di Indonesia”, *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief* Vol. 1. Ed. 9, (Juni 2021): 1.
- J. Obler, “Defending the Welfare State”, *The American Political Science Review* Vol. 80 No. 3 (September 1986): 949.
- Kathleen C. Pontoh, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional di Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. V No. 4 (April-Juni, 2016): 155.
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *UPH Law Review* Vol. 5 No. 3, (2006): 85-88.
- Muhamad Muhdar, “Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1 (Februari 2009): 74-75. DOI: 10.22146/jmh.16247
- Notika Rahmi Selvi dan Idar Rachmatulloh, “Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi* Vol 7 No. 1, (Maret 2020): 29.
- Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol* Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember, 2016): 108-109.
- Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks* Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni 2016):14.
- Soedjajadi Keman, “Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 3 No. 2 (Januari 2007): 198-201.
- Syahrani dan Muhammad Alfitras Tavares. “Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7 No. 1 (2020): 6. DOI: 10.38011/jhli.v7i1.212

Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State di Indonesia", *Trias Politika* 1 No. 1 (April, 2017): 172.

### **Hasil Penelitian**

Ati Harmoni. "Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Iklim". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional PESAT 2005, Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Paris Agreement 2015.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **Laporan**

Samuel Jonsson, Anders Ydstedt, dan Elke Asen. "Looking Back on 30 Years of Carbon Taxes in Sweden". Laporan Penelitian, Washington D.C 2020.

- <https://files.taxfoundation.org/20200929121706/Looking-Back-on-30-Years-of-Carbon-Taxes-in-Sweden-re.pdf>. Diakses pada 17 Oktober 2021.
- Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. “Indonesia Second Biennial Update Report”. Laporan Tahunan UNFCCC, Jakarta 2018. [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd\\_BUR.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf). Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. “Peta Jalan Implementasi NDC Mitigasi”. Laporan Tahunan, Jakarta 2020. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/admin/berita-admin/peraturan-perubahan-iklim/3328-peraturan-perubahan-iklim.html>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

### Website/Internet

- Antara News. “Sektor Kehutanan Miliki Porsi Terbesar Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”. <https://www.antarane.ws.com/berita/2355426/sektor-kehutanan-miliki-porsi-terbesar-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- ATPETSU. “Kamus Pajak”, <https://atpetsu.or.id/apa-itu-polluter-pays-principle>, diakses pada 14 Oktober 2021.
- Badan Pusat Statistik. “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2017-2019”. <https://www.bps.go.id/indikator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>. Diakses pada 16 Oktober 2021.
- Bappenas. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. <http://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Bisnis.com. “Indonesia Pungut Pajak Karbon, Korea Selatan Terapkan Carbon Trading”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211013/9/1453826/indonesia-pungut-pajak-karbon-korea-selatan-terapkan-carbon-trading>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Climate Transparency. “The Climate Transparency Report 2021: Indonesia”. <https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2021/10/CT2021Indonesia.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2021.
- CNBC Indonesia. “Pajak Karbon RI Rp 75/kg Jauh dari Rekomendasi Bank Dunia”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629104207-4-256685/pajak-karbon-ri-rp-75-kg-jauh-dari-rekomendasi-bank-dunia>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Darwinta Widjajanti, et. al. “Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) di Indonesia: Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik”. [https://www.iges.or.jp/en/publication\\_documents/pub/policyreport/id/4215/Indonesia\\_National\\_ESC\\_gui\\_delines\\_\(bahasa\)\\_1.pdf](https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/policyreport/id/4215/Indonesia_National_ESC_gui_delines_(bahasa)_1.pdf), diakses pada 24 Juli 2021.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Akhir-Pemerintah-terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596067.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2021.
- Dicky Edwin Hindarto dan Andi Samyanugraha. “Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan”. <https://www.mongabay.co.id/2021/06/11/pajak-karbon-dan-harapan-pembangunan-indonesia-berkelanjutan/>, diakses pada 20 Juli 2021.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/06/pemerintah-targetkan-20-000-kampung-iklim-pada-2024/>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Doni Agus Setiawan. “Begini Peta Jalan Pajak Karbon di Indonesia Hingga 2060”. [https://news.ddtc.co.id/begini-peta-jalan-pajak-karbon-di-indonesia-hingga-2060-33614?page\\_y=867](https://news.ddtc.co.id/begini-peta-jalan-pajak-karbon-di-indonesia-hingga-2060-33614?page_y=867), diakses pada 15 Oktober 2021.
- Greenpeace Indonesia. “Kita, Batubara, & Polusi Udara”. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>, diakses pada 20 Juli 2021.
- Hafidh Nadhor Tsaqib. “Menentukan Titik Efektif Pajak Karbon”. <https://news.ddtc.co.id/menentukan-titik-efektif-pengenaan-pajak-karbon—32070>, diakses pada 16 Oktober 2021.
- Jorgen Goul Andersen. “Welfare State and Welfare State Theory”. [http://www.dps.aau.dk/digitalAssets/205/205089\\_80-2012-joergen--goul-andersen.pdf](http://www.dps.aau.dk/digitalAssets/205/205089_80-2012-joergen--goul-andersen.pdf). Diakses pada 15 September 2021.
- IDX Channel. “Menperin Siapkan Insentif Fiskal Industri Hijau, Ini Progressnya”. <https://www.idxchannel.com/economics/menperin-siapkan-insentif-fiskal-industri-hijau-ini-progressnya>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- IMF Blog. “The Overwhelming Case for a Carbon Tax in China”. <https://blogs.imf.org/2016/07/27/the-overwhelming-case-for-a-carbon-tax-in-china/>, diakses pada 20 Juli 2021.
- Investor.id. “IMF Apresiasi Pemerintah Indonesia Mengenakan Tarif Pajak Karbon”. <https://investor.id/business/267591/imf-apresiasi-pemerintah-indonesia-mengenakan-tarif-pajak-karbon>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Katadata. “Riset: Potensi Investasi Energi Terbarukan Indonesia Capai Rp 175 T”. <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/6073f5a942087/riset-potensi-investasi-energi-terbarukan-indonesia-capai-rp-175-t>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “DDTC Webinar Series: University Roadshow”. <https://www.youtube.com/watch?v=fRwsLllu-Wc&t=4563s>, diakses pada 13 Oktober 2021.
- \_\_\_\_\_. “Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pengendali Perubahan Iklim”. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Akhir-Pemerintah->

terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596067.pdf, diakses pada 15 Oktober 2021.

- \_\_\_\_\_. “Perubahan Iklim di Indonesia”.  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/en/site/index/climate-finance-in-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2021.
- Kontan.id. “Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Menengah Turun Pendapatannya Akibat COVID-19”.  
<https://nasional.kontan.co.id/news/masyarakat-berpenghasilan-rendah-dan-menengah-turun-pendapatannya-akibat-covid-19>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- \_\_\_\_\_. “Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 April 2022, Ini Besaran Tarifnya”,  
<https://nasional.kontan.co.id/news/pajak-karbon-mulai-berlaku-1-april-2022-ini-besaran-tarifnya>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Nathan Rive. “The Pandemic Combined with Climate Change is Hitting The Poor Hard”.  
<https://blogs.adb.org/blog/pandemic-combined-climate-change-hitting-poor-hard>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- National Oceanic and Atmospheric Administration United States. “Climate Change Impacts”.  
<https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts>, diakses pada 18 Oktober 2021.
- Nora Galuh Candra Asmarani. “Apa Itu Earmarking Tax?”.  
[https://news.ddtc.co.id/apa-itu-earmarking-tax-25712?page\\_y=1392](https://news.ddtc.co.id/apa-itu-earmarking-tax-25712?page_y=1392), diakses pada 20 Oktober 2021.
- Pramono Dwi Susetyo. “Peluang Pajak Karbon di Indonesia”.  
<https://www.forestdigest.com/detail/1261/pajak-karbon-indonesia>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- PROPER. “Mekanisme PROPER”.  
<https://proper.menlhk.go.id/proper/mekanisme>, diakses 20 Oktober 2021.
- Rastri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani. “Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon”.  
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-102.pdf>, diakses pada 21 Juli 2021.
- Reuters. “Indonesia aims to sell only electric-powered cars, motorbikes by 2050”.  
<https://www.reuters.com/business/sustainable-business/indonesia-aims-sell-only-electric-powered-cars-motorbikes-by-2050-2021-06-14/>, diakses pada 15 Oktober 2021.
- Sustainable Development Goals. “Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim”.  
<https://www.sdg2030indonesia.org/page/21-tujuan-tigabelas>, diakses pada 16 Oktober 2021.
- Tax Foundation. “Pigouvian Tax”.  
<https://taxfoundation.org/tax-basics/pigouvian-tax/>, diakses pada 13 Oktober 2021.
- The Conversation. “Pajak Karbon Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Bagi Indonesia untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)”.  
<https://theconversation.com/pajak-karbon-bisa-menjadi-salah-satu-solusi-bagi-indonesia-untuk-mencapai-sustainable-development-goals-sdgs-165749>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- United Nations. “Climate Action: Why It Matters”.  
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp->

content/uploads/2019/07/13\_Why-It-Matters-2020.pdf, diakses pada 18 Juli 2021.

\_\_\_\_\_. “Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>, diakses pada 18 Juli 2021.

\_\_\_\_\_. “The Paris Agreement”, <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>, diakses pada 18 Juli 2021.

### **Kamus**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).

